



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 22 Juni 2021

Halaman: 2

TUNGGAKAN KEMENKES PULUHAN MILIAR RUPIAH BOR RS Mengkhawatirkan, Perlu Formulasi

YOGYA (KR) - Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit yang menangani pasien Covid-19, semakin mengkhawatirkan. Di samping penuh, terdapat persoalan teknis pengisian pasien. Kondisi tersebut dibutuhkan formulasi penanganan agar pasien yang membutuhkan perawatan medis dapat terjamin.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogya Antonius Fokki Ardiyanto, mengungkapkan pihaknya tengah menyusun rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pansus.

"Kami sudah melakukan sidak di rumah sakit swasta maupun pemerintah. Rapat koordinasi dengan instansi teknis juga sudah. Ada beberapa yang berhasil kami petakan. Terutama menyangkut BOR rumah sakit dan tunggakan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena cukup mendesak butuh so-

lusi," urainya, Senin (21/6).

Sidak di rumah sakit dilakukan akhir pekan lalu, yakni di RSUD Kota Yogya selaku rumah sakit rujukan Covid-19 unsur pemerintah dan RS Bethesda dari unsur swasta. Dari kedua rumah sakit tersebut diketahui jika BOR untuk penanganan pasien Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan.

Fokki menyebut, RSUD Kota Yogya memiliki 40 bed dan 7 bed khusus ICU. Sedangkan di RS Bethesda total ada 50 bed yang disiapkan untuk pasien Covid-19. Tingkat

keterisian kamar tersebut pun cukup dinamis. Tetapi rata-rata sudah di atas 85 persen.

"Tidak bisa dipastikan. Misal hari ini sudah terisi 100 persen, kemudian besok berkurang menjadi 85 persen. Namun masih ada antrean yang akan masuk," katanya.

Di samping itu, meski okupansi masih 85 persen, namun tidak setiap antrean bisa masuk untuk menempati kamar yang kosong. Hal ini karena ketentuan teknis terkait jenis kelamin maupun status disabilitas. Dicontohkannya jika dalam satu ruang terdapat

rumah sakit salah satunya bisa dilakukan dengan penambahan kapasitas kamar maupun rumah sakit rujukan. Bahkan jika memungkinkan perlu dibangun rumah sakit lapangan dengan koordinasi di tingkat provinsi. Apalagi Yogya merupakan ibukota provinsi sehingga kerap menjadi rujukan dari kabupaten lain.

"Dengan melihat situasi di kedua rumah sakit tersebut maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa situasi ini harus segera diantisipasi oleh Pemkot Yogya. Sehingga kemungkinan terburuk dari situasi pandemi Covid-19 dapat tertangani dengan baik dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan," harapnya.

Meski demikian, di luar itu pihaknya turut mendapati

tiga bed, dan sudah terisi satu bed oleh pasien perempuan, maka jika ada pasien laki-laki yang akan masuk otomatis tertolak. Pasalnya dua bed yang kosong tersebut tidak boleh diisi oleh lawan jenis. Kondisi itu ditemukan di RSUD dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di rumah sakit lain.

Menurut Fokki, kondisi tersebut membutuhkan formulasi penanganan. Hal ini karena BOR masih 85 persen namun belum semua kamar kosong bisa langsung diisi. "Ini fakta yang harus segera dicarikan formulasi penanganannya. Mengingat, di luar masih ada pasien yang antre. Tetapi untuk kebutuhan oksigen, tidak ada persoalan karena RSUD sudah tersentral," tandasnya.

Formulasi persoalan BOR di

akta mencengangkan terkait tunggakan Kemenkes di dua rumah sakit tersebut. Tidak tanggung-tanggung, totalnya mencapai Rp 26 miliar, yakni RSUD Kota Yogya sebesar Rp 16 miliar dan RS Bethesda Rp 10 miliar. Tunggakan itu berkaitan dengan klaim pelayanan periode akhir 2020 hingga bulan kemarin. Tunggakan dari Kemenkes itu pun bisa semakin besar karena setidaknya terdapat tujuh rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Yogya.

"Melihat situasi ini maka pansus mengharapkan kepada Walikota Yogya dan Gubernur DIY untuk bisa segera berkoordinasi dengan Kemenkes RI agar proses-proses pencairan klaim selama dokumennya lengkap segera dapat ditindakanjuti," jelas Fokki.

(Dhi)-d

Instansi	Nilai
1.	☐ No
2.	☐ Po
3.	☐ No
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005